BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, maka martabat dan derajat manusia akan terangkat Allah SWT berfirman :

Artinya : "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".[1]

Seiring dengan itu pendidikan merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya dukungan dan peran serta dari semua pihak terutama yang menyangkut masalah pembiayaan pendidikan.

[1]Q.S. Al-Mujaadilah [4] : 11

Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena segala kegiatan pendidikan tentu memerlukan dana atau biaya. Biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama pada saat tahun ajaran baru.

Penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam UU No. 20 tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat 1 tentang tanggung jawab pendanaan disebutkan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kemudian dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 tentang sumber pendanaan pendidikan disebutkan bahwa :

> Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Selama ini dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah relatif sangat terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN dalam bidang pendidikan menjadi kendala besar dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional yang berkualitas, termasuk pendidikan Madrasah Swasta. Hal ini sejalan dengan pernyataan Zubaidi : "Dari sekian permasalahan yang ada dalam pendidikan Islam diantaranya adalah masalah kekurangan dana dan minimnya fasilitas pendidikan", oleh

[2]Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006 h. 31

sebab itu masalah biaya pendidikan seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perlu adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat di dalamnya. Sebagaimana tertuang dalam pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 bahwa :

> Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.[3]

Oleh sebab itu selain memberikan dukungan sumber pembiayaan, masyarakat juga memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 54 ayat 1 dan 2 :

> Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.[4]

Berdasarkan UU tersebut, maka masyarakat berhak untuk mengetahui pendayagunaan biaya yang telah disumbangkan kepada lembaga pendidikan baik tingkat efektivitas maupun tingkat efsiensinya. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, sangatlah luas dan terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dan dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan

---

[3] *Ibid*, h. 8
[4] *Ibid*, h. 35

terutama pendidikan di Madrasah Swasta, baik dalam aspek pemikiran yang terkait dengan kebijakan Madrasah, maupun peran serta dalam hal fisik material. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat / orang tua siswa secara terbuka dan transparan. Dalam pengelolaan/manajemen pembiayaan pendidikan terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, pembelanjaan anggaran, pengawasan dan pelaporan pembiayaan.

Transparan dapat dipahami sebagai keterbukaan, artinya dalam pengelolaan keuangan sekolah dibutuhkan adanya keterbukaan. Keterbukaan tersebut menyangkut keterbukaan sumber-sumber penerimaan sekolah, jumlah dana yang dikelola sekolah, serta pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah tersebut. Melalui keterbukaan, akan mampu menimbulkan kepercayaan dari *stakeholder* sekolah, antara lain pemerintah, masyarakat luas, orang tua siswa, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lainnya. Keterbukaan ini penting, misalnya dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja Madrasah (RAPBM), dimana informasi mengenai RAPBM dapat dengan mudah untuk diakses dan dikritisi.[5]

Dalam penyusunan RAPBM, sebaiknya kepala sekolah membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Keterlibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan menghasilkan rencana yang cukup

[5]Donni Juni Priansa & Rismi Somad, *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung, Alfabeta, 2014, h. 143

baik, serta secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Menurut sumbernya, pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa, biaya pendidikan yang bersumber dari sponsor dan perusahaan serta biaya pendidikan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri.[6]

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penyelenggaraan pendidikan hanyalah tanggung jawab pemerintah semata. Akibatnya pendidikan dianggap terpisah dari kebutuhan masyarakat. Kondisi seperti ini harus segera di atasi secara benar dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu pendidikan dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting dan merupakan tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan. Semakin tinggi peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, maka semakin tinggi pula akuntabilitas pendidikan tersebut.

Kenyataan yang ada, sebagian besar lembaga pendidikan Madrasah Swasta saat ini masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua. Hal ini apabila dibiarkan, maka akan menimbulkan kekhawatiran : Madrasah Swasta tidak dapat mengelola dana masyarakat/orang tua secara optimal; masyarakat/orang tua tidak lagi peduli untuk ikut berperan serta dalam

[6]Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta, 2007, h. 9

pembiayaan pendidikan di Madrasah Swasta; dana penyelenggaraan pendidikan Madrasah Swasta sangat bergantung pada bantuan pemerintah; tujuan peningkatan mutu pendidikan Madrasah Swasta tidak dapat tercapai dengan baik.[7] Salah satu diantara Madrasah Swasta yang masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua adalah MTs Darul Ulum Palangka Raya.

Berdasarkan observasi awal oleh peneliti berkenaan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua (iuran Madrasah), diketahui pengelolaan dana tersebut belum dimanajemen secara maksimal dari proses pembuatan perencanaan penggunaannya, realisasi penggunaannya, pengawasan oleh pihak terkait dan pelaporan.[8]

MTs Darul Ulum Palangka Raya didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum. Madrasah ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mensukseskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun di Kota Palangka Raya. Lokasi lembaga pendidikan ini sangat strategis, karena berada di tengah kota. Keberadaannya dengan beberapa Madrasah/SMP Negeri dan Swasta lainnya yaitu, SMP Islam Nurul Ihsan, MTs Islamiyah dan MTsN-1 Model Palangka Raya. Posisi yang strategis ini merupakan tantangan berat bagi sebuah Madrasah Swasta untuk tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat/orang tua. Oleh sebab itu MTs Darul Ulum Palangka Raya selalu

[7]Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan..*, h. 12

[8]Observasi awal peneliti terhadap manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari orang tua pada tanggal 10 September 2014.

melakukan perbaikan kualitas manajemen secara terus menerus, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan terutama yang bersumber dari masyarakat/orang tua.

MTs Darul Ulum Palangka Raya telah meraih peringkat Akreditasi "A", karena telah melakukan upaya peningkatan kualitas pada beberapa aspek, seperti sarana dan prasarana pendidikan, proses pembelajaran, pelayanan sekolah, sumber daya manusia mulai dari kepala Madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun visi dan misi Madrasah adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya siswa yang religius, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan luas.

Misi : a. Menyelenggarakan pendidikan dasar berciri khas umum dan Pondok Pesantren.
b.Menyiapkan lulusan yang mampu memasukkan nilai-nilai keislamaan dan mengamalkannya di masyarakat.
c. Menyiapkan lulusan yang menguasai IPTEK dilandasi IMTAQ

Selanjutnya yang menarik adalah pada pendaftaran siswa baru tahun Pelajaran 2014/2105 MTs Darul Ulum Palangka Raya masih mendapatkan siswa sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni tiga rombongan belajar. Sehingga sampai pada akhir tahun 2014 jumlah siswa keseluruhan ada 305 siswa. Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada lembaga pendidikan ini. Untuk itu MTs Darul Ulum Palangka Raya selalu berupaya untuk memperbaiki sistem manajemen pendidikan, terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul "**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT/ORANG TUA". (Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya).**

Dipilihnya MTs Darul Ulum Palangka Raya sebagai setting penelitian karena berdasarkan observasi awal, peneliti menganggap masih belum maksimalnya dari pihak Madrasah dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat khususnya orang tua (iuran Madrasah).

B. Fokus Penelitian dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada: Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber dari orang tua studi pada MTs Darul Ulum Palangka Raya. Fokus penelitian ini selanjutnya dijabarkan dalam beberapa Sub fokus sebagai berikut:

1. Tentang Sumber Pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Tentang Perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) Tahun Pelajaran 2014/2015 di MTs Darul Ulum Palangka Raya.
3. Tentang realisasi dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya.

4. Tentang pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya.
5. Tentang laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya?

C. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah tersedianya dana yang memadai. Sumber dana pembiayaan pendidikan di Madrasah khususnya swasta ada pada orang tua. Selama ini peran serta orang tua dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah swasta belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya sistim manajemen keuangan Madrasah yang terbuka terhadap dana yang bersumber dari masyarakat.

Pembiayaan pendidikan di Madrasah khususnya, akan mendapat perhatian dari masyarakat apabila adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan. Madrasah harus membangun kredibilitas sebagai lembaga yang terpercaya dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat. Sehingga dengan demikian akan membangkitkan kepercayaan masyarakat untuk ikut berperan serta di dalamnya.

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) Tahun Pelajaran 2014/2015di MTs Darul Ulum Palangka Raya dirumuskan?
2. Bagaimana realisasi dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya?
3. Bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya?
4. Bagaimana laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Sub fokus masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang Rencana Anggaran Pendapatan Madrasah (RAPBM) terhadap pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya.
4. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
    a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan manajemen keuangan Madrasah.
    b. Secara khusus penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi peneliti mengenai manajemen keuangan Madrasah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Madrasah yang bersumber dari masyarakat.
    c. Untuk memperdalam kajian administrasi keuangan, khususnya pembiayaan pendidikan baik sebagai penguatan konsep teori pembiayaan maupun praktik dalam administrasi keuangan.
2. Secara Praktis
    a. Menjadi bahan masukan bagi Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Palangka Raya yang sedang mengembangkan dan memajukan Lembaga Pendidikan terutama dalam manajemen keuangan Madrasah.

b. Menjadi bahan masukan bagi para kepala Madrasah dalam pengelolaan keuangan Madrasah, khususnya pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua.
c. Memberikan umpan balik bagi pengelola MTs Darul Ulum Palangka Raya, sebagai kontribusi dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua.
d. Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya, atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam dengan topik dan fokus yang sama tetapi dengan setting yang lain untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian ini.